

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (Analysis of The National Capital Relocation Policy)

Suryadi Jaya Purnama* dan Chotib**

Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
KAMPUS UI Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat, Indonesia

*Email: suryadijks@gmail.com dan **Email: chotib@hotmail.com

Abstract

The government has announced a plan to move the national capital (IKN) to East Kalimantan Province and which has agreed upon at the DPR RI Plenary Meeting in early 2022. There are at least more than six main considerations why moving IKN is important to do. However, these considerations are felt to be insufficient to move the IKN from DKI Jakarta to East Kalimantan. In this regard, this paper will examine and analyze public policy aspects regarding the relocation of the national capital using a qualitative descriptive approach. Therefore, this paper does not only analyze the substance and implementation of policies but also elaborates on the responses from stakeholders. Pros and cons in preparing, building, and relocating the capital, especially in terms of financing/funding and what the economic implications, including potential failure, socio-ecological impact, and lessons learned from several countries. The author classifies the driving factors and inhibiting factors. As a large and important public project, the development and transfer of the IKN has the potential for strategic economic aspects through the realization of an economic transformation and Indonesia-centric, that will give birth to economic diversification and multiplier effects. However, a large economic potential must still consider sociological aspects, geographical aspects, and geopolitical aspects, which must be carried out in anticipation of risks that may arise as a follow up impact.

Keywords: national capital city, population density, APBN, economic-socio-cultural-ecological impact and risk anticipation

Abstrak

Pemerintah telah mencanangkan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur dan telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI pada awal Tahun 2022. Setidaknya terdapat lebih dari 6 pertimbangan utama mengapa pemindahan IKN penting untuk dilakukan. Namun pertimbangan tersebut dirasakan belum cukup untuk memindahkan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini akan mengkaji dan menganalisis aspek-aspek kebijakan publik mengenai pemindahan ibu kota negara dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, tulisan ini bukan hanya menganalisis substansi dan implementasi kebijakan saja, tetapi juga mengelaborasi tanggapan dari para pemangku kepentingan. Pro dan kontra dalam persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota terutama dalam hal pembiayaan/pendanaan serta bagaimana implikasi ekonominya, termasuk potensi kegagalan, dampak sosial-ekologis, dan pembelajaran dari beberapa negara. Penulis mengelompokkan dalam faktor pendorong dan faktor penghambat. Sebagai proyek publik besar dan penting, pembangunan dan pemindahan IKN memiliki potensi aspek ekonomi yang strategis melalui terwujudnya transformasi ekonomi dan Indonesia sentris yang akan melahirkan diversifikasi ekonomi dan *multiplier effect*. Namun demikian, potensi ekonomi yang besar harus tetap mempertimbangkan aspek sosiologis, aspek geografis, dan aspek geopolitik yang harus dilakukan antisipasi risiko yang mungkin muncul sebagai dampak susulan. Kata kunci: ibu kota negara, kepadatan penduduk, APBN, dampak ekonomi-sosial-budaya-ekologi dan antisipasi risiko

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui Pemerintah telah mencanangkan pemindahan Ibukota dari Jakarta ke sebuah kawasan di Kalimantan Timur. Pemerintah melalui Kementerian PPN/BAPPENAS telah menjelaskan beberapa alasan terkait lokasi ibu kota baru hingga memilih kawasan di luar Pulau Jawa khususnya di Kalimantan Timur tersebut dengan alasan sebagai berikut. *Pertama*, data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) bahwa di tahun 2020 menunjukkan bahwa populasi penduduk di pulau Jawa sendiri telah mencapai 151,59 juta atau sekitar 56,10 persen dari total populasi penduduk Indonesia. Data ini membuktikan bahwa beban kependudukan Indonesia selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Kedua, terkait dominasi dan kontribusi ekonomi

dalam bentuk Produk Domestik Bruto (PDB) di mana Pulau Jawa yang berkontribusi sebesar 57,89 persen dari PDB nasional pada tahun 2021 yang mencapai Rp16.970,8 triliun dengan PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta atau USD4.349,5. (infoindonesia.id, 2022). Di mana mayoritas kontribusi PDB Pulau Jawa tersebut berasal dari kawasan Jakarta sebagai ibu kota dan daerah peyangganya yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang mencapai 20,85 persen. Jika dilihat dari PDB per kapita DKI Jakarta mencapai Rp274,7 juta, sementara rata-rata nasional hanya mencapai Rp62,2 juta. Artinya PDB per kapita DKI Jakarta lebih dari empat kalinya PDB rata-rata nasional. (databoks.katadata.co.id, 2022).

Alasan *Ketiga*, terkait kondisi ketersediaan air bersih di Jawa yang tengah menghadapi krisis air berdasarkan data tahun 2016 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Keempat*,

berdasarkan pemodelan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan Bappenas menunjukkan bahwa pulau Jawa telah mengalami begitu banyak perubahan/konversi fungsi lahan. Pemodelan ini menjelaskan bahwa terdapat proporsi yang tidakimbang ketika Jawa lima kali lipat dibandingkan Pulau Kalimantan terkait penggunaan lahan untuk kebutuhan konsumsi.

Alasan berikutnya berhubungan dengan alasan pertama yakni pertumbuhan urbanisasi di Pulau Jawa yang begitu masif terutama di kawasan penyangga Ibu Kota Jakarta seperti, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan kawasan Cianjur. Diperkirakan terdapat 32 juta penduduk tinggal di kawasan yang dikenal sebagai Jabodetabek punjur tersebut. Sementara alasan terakhir terkait dengan potensi dan kerawanan lingkungan yang dihadapi oleh kota Jakarta sendiri seperti banjir, longsor, abrasi air laut, polusi yang sangat serius di berbagai sungai, maupun terkait kemacetan lalu lintas. (Bappenas, 2019).

Terdapat sejumlah kritik dari berbagai pihak terkait rencana pemindahan dan pembangunan ibukota baru ini berikut pilihan lokasinya. Diningrat (2019) menilai rencana pemerintah dianggap kurang matang karena dua alasan yang dipakai untuk memindahkan ibu kota ke luar Jakarta yakni pemerataan dan daya dukung Jakarta, masih lemah. Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa tidak cukup karena pemerintah butuh mendistribusikan lebih banyak lagi pusat pertumbuhan baru dan peluang ekonomi di luar Jawa, khususnya wilayah timur Indonesia.

Kritik serupa juga disampaikan oleh Fraksi PKS DPR RI dalam penyampaian Pendapat Akhir di Rapat Paripurna 18 Januari 2022 bahwa pemindahan Ibu Kota Negara butuh banyak proses, baik pendanaan, sumber daya manusia, lingkungan, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya (dpr.go.id., 2022). Fraksi PKS menilai pemindahan IKN akan membebani keuangan negara apalagi di saat menghadapi pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Di lain kesempatan empat ekonom juga menyampaikan kritik terkait ide pemindahan ibu kota ini. David Henley, akademisi dari Leiden University (CNBC Indonesia, 2019) menyatakan bahwa pemindahan ibu kota Indonesia belum saatnya dilakukan dan sebaiknya dana pemindahan Ibu Kota tersebut dialokasikan ke beberapa sektor demi mendorong perekonomian di Indonesia. Kritik lainnya dari peneliti *Institute for Development Economics and Finance* (INDEF) Didik J. Rachbini yang meyakini bahwa pemindahan IKN yang dilakukan dengan terburu-buru akan semakin membebani APBN yang saat ini sedang kritis (rmol.id, 2022).

Sementara ekonom senior INDEF lainnya,

Fadhil Hasan juga mempertanyakan urgensi pemerintah memindahkan IKN di tengah pandemi Covid-19 yang menyebabkan kemerosotan ekonomi nasional (cnnindonesia, 2021) Selain itu, Emil Salim yang juga pernah menjadi Menteri Lingkungan Hidup RI berpendapat bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan tidak bisa dijustifikasi dengan membandingkan pemindahan ibu kota dalam kasus Indonesia dengan negara lain. Selain itu, Emil juga berpendapat bahwa pemindahan IKN dikhawatirkan akan menghilangkan nilai historis negara (kontan.co.id, 2021).

Di sisi internal aparat pemerintah sendiri masih cukup ramai berbagai pro dan kontra dalam menyikapi rencana serta proses pemindahan ibukota ini. Hal ini terungkap dalam investigasi Imawan (2021) yang mengungkapkan bahwa pemindahan ibukota negara tidak sesederhana memindahkan bangunan fisik dari Jakarta ke Kalimantan Timur karena kebijakan ini akan melibatkan banyak sekali aktor dan pemangku kepentingan.

Selain itu, terdapat kelemahan pada aspek legalitas dan legitimasi yang menimbulkan kerancuan hukum dalam koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Kalimantan Timur sehingga berpotensi membuka ruang kesalahan manajemen dalam hal penggunaan lahan dan kerentanan terjadinya tindak pidana korupsi terkait proses pembangunan ibu kota baru tersebut. Di sisi lainnya adalah tantangan dalam proses dan manajemen pengerahan aparat sipil yang mumpuni bagi ibukota baru nantinya. Tanpa manajemen dan disiplin yang memadai, maka apa yang terjadi di Jakarta terkait pertumbuhan populasi yang sulit dikontrol mendorong kemungkinan untuk memindahkan ibukota ke tempat lain di masa berikutnya.

Bahkan beberapa waktu lalu (23/04/2020) peneliti gabungan dari Inggris dan Indonesia mengungkap adanya potensi risiko tsunami di wilayah yang dipilih sebagai calon ibu kota baru. Para peneliti tersebut menemukan bahwa tanah longsor bawah laut pernah beberapa kali terjadi di Selat Makassar, antara pulau Kalimantan dan Sulawesi. Jika kejadian tanah longsor yang paling besar terulang hari ini, tsunami akan muncul dan bisa membanjiri Teluk Balikpapan-daerah yang dekat dengan calon ibu kota. Hasil penelitian tersebut seolah mengkonfirmasi peringatan sebelumnya yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Bernardus Wisnu Widjaya yang menyebutkan wilayah tersebut berpotensi banjir ini terutama terjadi di kawasan muara, sungai, dan wilayah dekat pantai.

Dikarenakan kebijakan pemindahan ibukota

merupakan hal yang sangat serius dengan berbagai konsekuensinya, maka pemerintah pusat berkewajiban untuk memberikan perhatian yang juga serius terhadap berbagai dinamika pro-kontra yang terjadi di tengah masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh Dye (2002) bahwa *kebijakan publik adalah langkah yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan*. Namun tentu akan lebih bijak bilamana setiap pembuatan kebijakan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan untuk menghasilkan kebijakan yang solid dan kondusif serta rasional untuk diimplementasikan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, tulisan ini bertujuan menganalisis pemindahan IKN dari sisi kebijakan publik khususnya terkait dengan masih tingginya resistensi masyarakat terhadap proses pembuatan kebijakan publik tersebut dan bagaimana pemerintah dalam berproses mewujudkannya.

METODE

Tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengkompilasi berbagai sumber literatur baik yang merupakan data primer maupun sekunder. Bertujuan untuk memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan strategis terkait pemindahan ibukota negara yang menjadi topik analisis. Tulisan ini merujuk pada beberapa jurnal akademik, opini dan pandangan para ahli yang kompeten baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak, juga data statistik yang dipublikasi oleh otoritas terkait maupun laporan survei dari berbagai lembaga kredibel.

Tulisan ini lebih berperan sebagai analisis terhadap sebuah kebijakan khususnya terkait kebijakan pemindahan ibukota dibandingkan sebagai riset kebijakan itu sendiri. Para pakar yakni Weimer dan Vining (2011) membedakan kedua terminologi tersebut berdasarkan kekhasan dan karakteristik masing-masing tersebut di atas. Di mana riset kebijakan secara spesifik bertujuan untuk memprediksi dampak dari perubahan pada sebuah kebijakan publik berikut variabel-variabelnya yang mempengaruhinya, sementara analisa kebijakan berfokus pada perbandingan dan evaluasi dari sekian alternatif strategi bagi aktor publik dalam rangka mengatasi berbagai problem sosial yang timbul sebagai akibat kebijakan yang muncul. Kedua pakar di atas juga menegaskan bahwa kedua terminologi tersebut juga berbeda dalam hal pengguna jasanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil telaah penelitian empiris yang ada terungkap bahwa berbagai kajian terkait pemindahan

ibukota dari sebuah negara telah dilakukan. Ishenda & Guoqing (2019), misalnya, telah mengkaji terutama terkait dengan faktor penentu pemindahan sebuah ibu kota. Mereka menganalisis beberapa faktor yang memengaruhi pemindahan ibu kota, yaitu: produk domestik bruto (PDB) per kapita, pertumbuhan ekonomi, luas wilayah, jumlah penduduk, kepadatan, bentuk pemerintahan, bentuk wilayah, dan jenis modal. Dari analisis dengan menggunakan model logistik, mereka dapat memberikan kesimpulan bahwa ada empat variabel yang signifikan adalah: PDRB per kapita, luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk.

Salah satu kajian yang menarik terkait motif atau alasan pemindahan IKN adalah studi yang dilakukan oleh Illmann (2015). Studi tersebut mengeksplorasi lima belas pemindahan IKN di belahan dunia sejak tahun 1900 dengan menciptakan tipologi alasan yang digunakan oleh negara tersebut ketika IKN dipindahkan di negara tersebut. Studi Illmann ini menyimpulkan bahwa ada lima tipologi alasan mengapa ibu kota pindah yaitu: (1) tujuan pembangunan atau penguatan identitas bangsa; (2) penyebaran pembangunan daerah; (3) masalah kompleks yang dihadapi oleh ibu kota sebelumnya; (4) untuk mengurangi atau meredam ancaman pemberontakan; dan (5) subjektifitas keputusan pemimpin negara tersebut.

Terkait dengan penguatan identitas bangsa, Illmann (2015) menjelaskan bahwa IKN pada dasarnya merupakan simbol kekuatan dan identitas sebuah bangsa. Memindahkan IKN dipercaya akan dapat mendukung dalam penguatan identitas suatu bangsa. Berbeda dengan IKN yang lama yang cenderung diterima apa adanya, calon IKN baru biasanya dapat direncanakan lebih baik dengan membuat, menyesuaikan, atau memperkuat identitas nasional negara. IKN juga dapat dijadikan simbol keberagaman seperti agama, etnis, atau ideologi sehingga dapat menyatukan sebuah bangsa dan menjadi objek kebanggaan nasional. Contoh negara yang menggunakan alasan pemindahan IKN sebagai penguatan identitas bangsa adalah Nigeria, Jerman, Turki, Pakistan, Kazakhstan, Tanzania dan Malaysia.

Terkait dengan IKN sebagai bentuk pemerataan pembangunan, maka menurut teori pusat pertumbuhan bahwa keberadaan sebuah ibu kota dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota diyakini dapat mengatasi ketertinggalan pembangunan suatu daerah. Adapun negara yang menggunakan alasan seperti ini antara lain adalah Brasil, Belize, Malawi, Tanzania, dan Korea Selatan.

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh

ibu kota sebelumnya, Illmann (2015) menjelaskan bahwa beberapa permasalahan yang terjadi pada ibu kota sebelumnya seperti banjir, bencana, kemiskinan, infrastruktur, dan kelebihan populasi sehingga dapat mempengaruhi fungsi suatu pemerintahan. Beberapa negara yang memilih memindahkan ibu kota dibanding menyelesaikan permasalahan IKN yang lama seperti Belize, Brasil, dan Pakistan.

Hal lain yang bisa saja menjadi alasan sebuah IKN dipindahkan adalah karena adanya isu pemberontakan dan keamanan negara. Menurut Illmann (2015) salah satu mitigasi menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh negara non demokratis biasanya adalah melakukan pemindahan ibu kota. Dengan memindahkan ibu kota dari pusat populasi utama dan ke daerah yang terisolasi, maka pemerintah dapat mengurangi risiko pemberontakan. Contoh relokasi IKN yang pernah dilakukan dengan alasan menghindari pemberontakan dan keamanan adalah India, Rusia, Myanmar dan Malawi.

Hal lain yang mendorong terjadinya perpindahan IKN ternyata adalah subjektivitas keputusan pimpinan negara tersebut. Menurut Illmann (2015) seorang pimpinan negara memiliki peran yang sangat penting terhadap pemindahan ibu kota. Kasus ini biasanya terjadi untuk negara-negara yang biasanya relatif tidak membuka wacana perdebatan perpindahan IKN di publik seperti Cote d'Ivoire (Pantai Gading), Pakistan, Malawi, Nigeria, Kazakhstan, dan Malaysia.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pemindahan Ibu Kota Negara

Selain studi yang fokus dengan faktor penentu atau alasan pemindahan sebuah ibu kota negara, studi-studi lain juga telah mengkaji faktor pendorong dan penghambat pemindahan ibu kota yang antara lain sebagai berikut.

Faktor pendorong

Pertimbangan politik sering kali menjadi pertimbangan utama dalam pemindahan ibu kota. Pertimbangan ini berguna untuk meningkatkan persatuan nasional (*national cohesion*), membangun simbol kebangkitan negara dan merepresentasikan lebih baik keragaman suku bangsa. Pertimbangan tersebut digunakan pemerintah Brazil, Nigeria dan Pakistan dalam memindahkan ibu kota negaranya masing-masing (Nwafor 1980; Stephenson 1970). Selain itu, pemindahan ibu kota juga dapat dijadikan cara untuk menegaskan arah politik negara seperti saat pemerintah Tanzania memindahkan ibu kotanya dari Dar es Salaam ke Dodoma untuk lebih mengembangkan politik Sosialisme dengan membangun kawasan pedesaan di Dodoma (Hoyle

1979).

Pertimbangan sosio-ekonomi menjadi pertimbangan penting dalam memindahkan ibu kota khususnya untuk mengurangi ketimpangan wilayah di negara-negara tersebut. Diharapkan dengan pembangunan ibu kota baru dapat dikembangkan kawasan baru yang dapat mengurangi pemusatan kegiatan di lokasi ibu kota yang lama. Ibu kota-ibu kota lama, seperti Rio de Janeiro, Lagos, Dar es Salaam, Zomba dan Belize City merupakan pusat pertumbuhan utama dan *primate city* di negaranya masing-masing. Pertumbuhan ekonomi di ibu kota-ibu kota lama ini jauh lebih cepat dibandingkan wilayah-wilayah lainnya di negara-negara tersebut (Nwafor 1980; Potts 1985; Stephenson 1970).

Keterbatasan kondisi fisik di ibu kota lama juga menjadi pertimbangan pemindahan ibu kota di beberapa negara seperti Nigeria, Brazil dan Pakistan. Ibu kota-ibu kota lama termasuk Lagos, Rio de Janeiro and Karachi dianggap sudah terlalu padat dan tidak mampu lagi menampung kebutuhan ruang bagi pengembangan kota. Kota-kota tersebut dianggap tidak mampu menyediakan infrastruktur dan fasilitas perkotaan yang memadai serta memiliki harga lahan yang tinggi (Doxiadis 1965). Keputusan memindahkan ibu kota Belize dari Belize City ke Belmopan adalah akibat seringnya bencana *hurricane* yang melanda Belize City (Gilbert 1989; Kearns 1973). Bencana *hurricane* yang menimpa Belize City sering kali melumpuhkan kegiatan pemerintahan Belize dan bahkan menyebabkan kerusakan dan kehilangan dokumen-dokumen penting pemerintahan Belize (Kearns, 1973).

Memindahkan aktivitas perekonomian cenderung tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin fungsi sebagai ibukota dipindahkan ke kota lain demi memperbesar daya dukung kota lama untuk nyaman dihuni dan memberi kesempatan kota baru dan kawasannya juga turut berkembang. Pertimbangan pemindahan Ibukota dengan alasan masalah sosial yang muncul, daya dukung ekologi dan berbagai persoalan transportasi Kota Jakarta, jelas perlu disikapi secara hati-hati. Jangan sampai keinginan penyelesaian persoalan Ibukota Jakarta sekedar memindahkan masalahnya ke daerah yang dituju sebagai kawasan Ibukota Negara nantinya.

Ibu Kota Jakarta yang multifungsi merupakan dampak dari penerapan sistem pemerintahan yang sentralistis. Akibatnya sejumlah dampak sosial politik ekonomi dan ekologi muncul dari penerapan sistem pemerintahan semacam itu, meskipun diakui hal ini sebagai bentuk penopang stabilitas politik guna pelaksanaan pembangunan ekonomi. Kesadaran atas kuatnya era otonomi daerah dan masih hidupnya sentimen etnisitas, meskipun

Kalimantan Timur tergolong moderat dalam karakter sosial warganya, kiranya penting untuk pengelolaan pemerintahan yang sesuai terkini keadaan dan arah tahapan pengembangannya dimasa depan. Untuk mewujudkan model pengelolaan pemerintahan semacam itu, maka dibutuhkan banyak hal dalam mendukung kemauan politik pemerintah tanpa mengabaikan aspek aturan hukum di antaranya adalah: (1) kesiapan lahan pemukiman dan tata ruang wilayah kota (masterplan dan desain tata ruang); 2 kesiapan sumber daya manusia (SDM) pendukung; (3) perhatian menyangkut aspek sosial budaya, utamanya terkait kearifan lokal setempat di wilayah Kalimantan Timur; (4) aspek keamanan; (5) daya dukung lingkungan hidup (Bappenas, 2019).

Harus disadari bahwa persoalan anggaran dan pengalokasiannya adalah hal yang sangat mendasar bagi upaya pemenuhan tujuan perpindahan Ibukota Negara, tetapi bukan berarti persoalan aspek sosial kemasyarakatan dan fasilitas infrastruktur dan suprastruktur politik penunjang menjadi tidak penting untuk diperhatikan. Ini artinya dibutuhkan strategi komunikasi yang tepat lintas sektor dan daerah terkait tahapan pemindahan Ibukota yang direncanakan, agar tidak terjadi saling klaim ego sektoral yang justru menghambat upaya pemerataan pembangunan nasional melalui agenda pemindahan Ibu Kota Negara (Bappenas, 2019).

Faktor penghambat

Posisi IKN baru rentan terhadap ancaman dari luar. Hal ini dapat dilihat dari sejarah yang pernah terjadi saat Jepang pertama kali datang ke nusantara menduduki terlebih dahulu Balikpapan dan sekitarnya sebelum melanjutkan invasi ke Jawa. Kebutuhan dana yang sangat besar. Aspek pembiayaan pemindahan IKN ini juga masih tanda tanya besar. Berdasar perkiraan Bappenas (2019) kebutuhan pembiayaannya total Rp466 triliun. Dengan biaya sebesar ini, pemindahan IKN akan berdampak pada meningkatnya +0,1 persen PDB riil nasional, menurunnya kesenjangan antar kelompok pendapatan yang dilihat dari kenaikan *price of capital* dan *price of labor*, mendorong perdagangan antar wilayah di Indonesia, juga mendorong investasi di provinsi IKN baru dan provinsi sekitarnya.

Persoalannya, pemerintah melalui APBN hanya menyumbangkan 19 persen dari total kebutuhan dana tersebut. Adapun saat ini, defisit anggaran negara sudah mencapai Rp127,5 triliun atau 0,79 persen dari PDB. Defisit ini lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu yang jumlahnya Rp93,5 triliun. Meski demikian, pemerintah berharap pada pendanaan dari Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), yang diproyeksikan memiliki porsi yang besar dalam mendanai pemindahan pusat pemerintahan,

yakni sebesar 54 persen dari total pembiayaan pemindahan IKN (Vernando, 2022).

Skema di atas belum bisa dikatakan efektif untuk segala kebutuhan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan IKN. Selain itu, coba kita bandingkan misalnya dengan pembangunan 12 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurut perkiraan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pengembangan KEK ini membutuhkan dana sebesar Rp46 triliun atau 10 persen dari pembangunan IKN. Tapi, dengan dana tersebut diperkirakan bisa mendorong investasi ikutan hingga Rp655 triliun. Namun, yang paling penting, secara kewilayahan, pembangunannya tidak terfokus pada satu titik. Tapi tersebar di 12 titik di seluruh ide, yang diharapkan menjadi sumber pertumbuhan baru bagi nasional dan regional. Artinya, segala biaya dan manfaat dari setiap pilihan harus terus dihitung dengan cermat, termasuk perlunya belajar dari negara-negara yang tidak pernah memindahkan ibu kotanya. Ambil contoh, London, Paris, dan Tokyo sebagai kota besar yang pusat pemerintahan negaranya terus bergabung dengan pusat bisnisnya (liputan6.com, 2017). Barangkali kita bisa belajar, bagaimana membangun dan mengelola kawasan metropolitan di mana tergabung pusat pemerintahan dan pusat bisnis dalam satu kawasan.

Peraturan Presiden No. 3 tahun 2012 tentang Rencana Tata Kota Kalimantan menyebutkan bahwa paling sedikit 45 persen dari luas Pulau Kalimantan diperuntukkan sebagai paru-paru dunia. Penduduk IKN rentan terhadap kondisi rawan pangan, sebab Kalimantan Timur dan daerah sekitarnya belum swasembada pangan. Penduduk IKN dan sekitarnya berpotensi kekurangan air baku sebab daerah tersebut terindikasi sangat minim sumber air baku. Potensi Banjir di IKN juga tinggi karena selama ini 60,34 persen bencana yang terjadi di Kalimantan Timur didominasi oleh banjir. Potensi dari gempa dan tsunami yang disebabkan longsor bawah laut, di mana terdapat tiga titik sesar yakni Sesar Maratua, Sesar Mangkalihat, dan Sesar Paternostes.

Dari sisi kelembagaan, sejarah republik ini menunjukkan, hampir setiap program pengembangan kawasan yang dirintis oleh pemerintah justru selalu jalan di tempat. Mulai sejak pembangunan kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Kawasan Berikat pada awal 1970-an, dilanjutkan dengan pembangunan Kawasan Industri di akhir 1980-an. Lalu, program Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang diinisiasi Habibie pada tahun 1996, hingga pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sejak tahun 2009. Semua program itu belum pernah memberikan hasil maksimal. Bahkan terakhir, pembangunan 10 Kota

Baru Publik yang tertera dalam RPJMN 2014-2019 pun masih jalan di tempat. Progres paling baik hanya ada di Kota Baru Maja di Provinsi Banten yang notabene didorong oleh peran swasta. Selain itu, pada skala lokal, sebenarnya kita telah memiliki segudang pengalaman pemindahan ibu kota pada level provinsi, kabupaten, dan kota. Sebut saja, Sofifi di Maluku Utara maupun Way Hui di Lampung.

Sayangnya, hampir seluruh pemindahan ibu kota di level lokal belum menunjukkan ada satu pun yang berhasil, baru pada skala pemindahan kompleks pemerintahan saja. Pelajaran utama dari berbagai ide pengembangan kawasan di Indonesia ialah peran pemerintah yang terlalu dominan dalam pengembangan kawasan strategis, sehingga terkadang melupakan aspek kearifan lokal dan pelibatan masyarakat secara langsung.

Dalam pandangan penulis, seharusnya peran pemerintah terbatas untuk pembangunan infrastruktur utama yang krusial. Sektor swasta yang kemudian seharusnya dilibatkan untuk mengisi ruang-ruang perluasan dan pengembangan yang berpotensi memacu pertumbuhan kawasan. Persoalan lain dari sisi kelembagaan adalah konsistensi kebijakan. Kita harus mengakui, bangsa Indonesia perlu meningkatkan kemampuannya dalam hal memastikan keberlanjutan suatu program jangka panjang. Apalagi, bila program ini melibatkan pihak di luar pemerintah, seperti swasta dan lembaga asing. Simpang siur kebijakan jangka panjang pasti menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masa depan IKN, yang pada akhirnya akan menghambat realisasi tahapan program dan pencapaian tujuan

Aspek-Aspek Yang Harus Diperhatikan dalam Pemindahan IKN

Dari hasil telaah literatur di atas dan analisis penulis, berikut ini adalah rekomendasi terkait aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pemindahan ibukota Negara.

Aspek Sosiologis

Rencana pemindahan IKN otomatis akan diikuti dengan adanya pemindahan manusia. Masyarakat baru tersebut akan berinteraksi dengan lingkungan baru dan masyarakat asli sehingga akan muncul tantangan sosial. Masyarakat pendatang akan menjadi minoritas. Namun lambat laun memungkinkan untuk mendominasi kegiatan di lokasi IKN tersebut. Oleh karena itu, sebelum munculnya permasalahan sosial, diperlukan adanya upaya memitigasi penanggulangan. Upaya tersebut antara lain penguatan masyarakat asli, integrasi masyarakat asli dengan pendatang dan meningkatkan

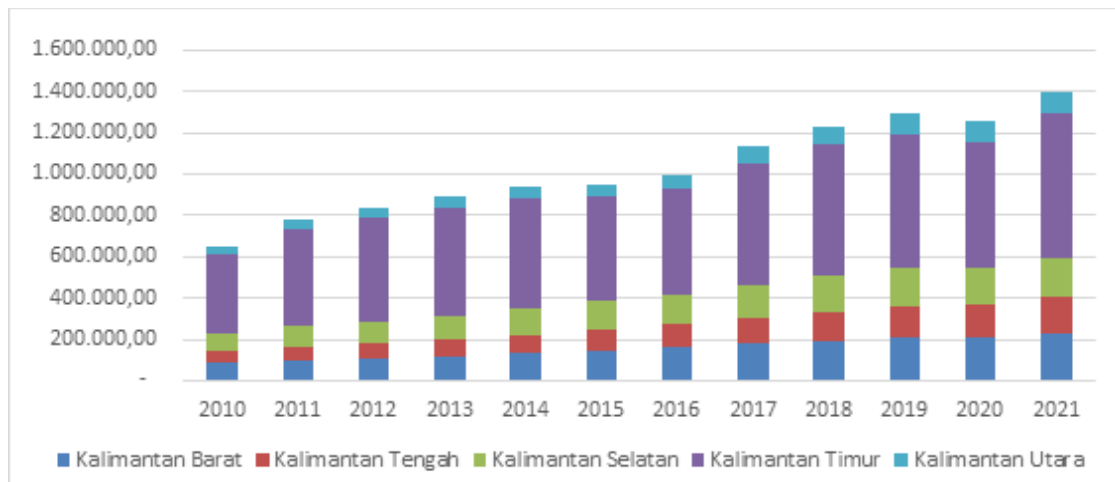
pemahaman mengenai kelestarian lingkungan. Salah satu kunci dalam mewujudkan hal tersebut adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi antara lain memanfaatkan bahan baku lokal yang berwawasan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat asli yang didominasi masyarakat berpenghasilan rendah dan menguatkan kelembagaan sosial seperti forum lintas agama.

Berdasarkan data BPS tahun 2015 yang berjudul Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur pada 2019 diperkirakan sebanyak 3,5 juta jiwa. Secara rinci, jumlah penduduk tersebut terdiri atas 1,8 juta laki-laki dan 1,7 juta perempuan. Hingga 2045, diproyeksikan pertumbuhan penduduk Kalimantan Timur setiap lima tahun meningkat rata-rata 4,41 persen. Pada 2020, jumlah penduduk Kalimantan Timur diprediksi mencapai 3,6 juta jiwa dengan 1,9 juta laki-laki dan 1,7 juta perempuan. Lima tahun kemudian meningkat 5,86 persen menjadi 3,9 juta jiwa dengan 1,9 juta laki-laki dan 1,8 perempuan. Pada 2030 jumlah penduduknya penduduk laki-laki meningkat 5,02 persen menjadi 4 juta jiwa. Hingga 2045 penduduk Kalimantan Timur diproyeksikan meningkat 5,8 persen dari lima tahun sebelumnya. Secara rinci, penduduk laki-laki dan perempuan hanya selisih 3,8 ribu jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 2,25 juta dan perempuan sebanyak 2,24 juta

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lima provinsi di Kalimantan mencapai Rp1.228,89 triliun tumbuh hampir dua kali lipat dibandingkan dengan Rp646,11 triliun pada 2010. Adapun Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan PDRB terbesar di Kalimantan, yakni mencapai Rp638,11 triliun. Provinsi yang memiliki ibu kota Samarinda tersebut berkontribusi lebih dari separuh total PDRB Kalimantan. Sementara PDRB Kalimantan Utara merupakan yang terkecil di antara lima provinsi. (Gambar 1).

Kalimantan Timur tercatat sebagai provinsi yang nyaris tidak pernah terjadi konflik sosial yang masif meskipun masyarakat Kalimantan Timur sebenarnya sangat heterogen. Berdasarkan data Statistik Kriminal 2018 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2018), Kalimantan Timur menjadi salah satu dari 10 provinsi yang konflik massalnya rendah di 2017. Persentase desa atau kelurahan di Kaltim yang mengalami konflik massal sebesar 1,64 persen atau peringkat 10 terendah di Indonesia.

Adapun jumlah konflik massal yang terjadi di Kaltim sebanyak 17 kejadian. Namun jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kalimantan, konflik massal di Kaltim masih lebih tinggi. Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan konflik



Sumber: Mauleny, AT, (2022a).

Gambar 1. PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi di Kalimantan

massal terendah di Kalimantan dan terendah ketiga di Indonesia. Persentase konflik massal di Kalimantan Tengah sebesar 0,82 persen. Persentase konflik massal di Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan masing-masing 1,04 persen dan 1,05 persen. Sementara itu, Kalimantan Barat berada di posisi kesembilan terendah dengan persentase konflik massal 1,4 persen. Jenis konflik massal di sini meliputi perkelahian antar warga, perkelahian warga antar desa/kelurahan, perkelahian warga dengan aparat keamanan, perkelahian warga dengan aparat pemerintah, perkelahian antar pelajar, dan perkelahian antar suku (Katadata, 2019).

Secara sosiologis, masyarakat Provinsi Kalimantan Timur bersifat heterogen dengan komposisi penduduk Jawa 30,24 persen, Bugis 20,81 persen, Banjar 12,45 persen, serta Dayak 9,94 persen, dan lain-lain. Dengan komposisi penduduk yang sebagian besar merupakan pendatang, wilayah Provinsi Kalimantan Timur relatif aman dari masalah sosial dan konflik suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Hanya saja yang perlu diestimasi dan diukur adalah dampak kesenjangan sosial yang timbul akibat penetapan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara adalah migrasi penduduk secara massal yang sebagian besar merupakan aparatur sipil negara (ASN) pusat. Untuk meminimalisir kesenjangan dan menciptakan iklim toleransi pasca Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara, pemerintah daerah bersama aparat telah melakukan sosialisasi pemindahan ibu kota negara kepada tokoh, ketua adat dan masyarakat lokal.

Aspek Geografis

Presiden Joko Widodo menyebutkan lima alasan utama dipilihnya Kalimantan sebagai IKN, yaitu:

(kominfo, go.id, 2019).

1. Risiko bencana alam yang minimal, baik banjir, tsunami, kebakaran hutan, gunung merapi maupun tanah longsor.
2. Lokasi yang strategis dan ada di tengah-tengah Indonesia.
3. Lokasi yang berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang seperti Balikpapan dan Samarinda.
4. Infrastruktur relatif lengkap.
5. Tersedia lahan yang dikuasai pemerintah 180 ribu hektar.

Jika diamati lebih lanjut, kelima alasan di atas lebih dominan didasari pada alasan geografis. Tentunya hal tersebut tidak serta merta dapat dijadikan sebagai alasan dalam penunjukan IKN. Hal ini karena Kalimantan Timur merupakan provinsi yang memiliki potensi banjir yang tinggi. Selama ini sekitar 60,34 persen potensi banjir terjadi di provinsi Kalimantan Timur. Belum lagi potensi dari gempa dan tsunami yang disebabkan longsor bawah laut, dimana terdapat tiga titik sesar yakni Sesar Maratua, Sesar Mangkalihat, dan Sesar Paternostes (Kompas.com, 2019). Oleh karena itu, paling tidak diperlukan adanya perbandingan dari beberapa opsi daerah terkait aspek geografis yang dijadikan penilaian dalam penunjukan IKN. Hal ini karena setiap daerah di Indonesia memiliki aspek geografis yang berbeda dan tidak menutup kemungkinan juga memiliki keunggulan untuk dijadikan alternatif sebagai IKN.

Tabel 1 menunjukkan bahwa jika dibandingkan antara tiga daerah khusus yang ada yaitu Aceh, Yogyakarta dan Jakarta, mana daerah yang paling sedikit berpotensi terjadi bencana alam (banjir, tanah longsor, gempa, gelombang pasang, kekeringan dan sebagainya), DKI Jakarta termasuk daerah yang

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam dan yang Tidak Mengalami, pada Tahun 2018 dan 2021

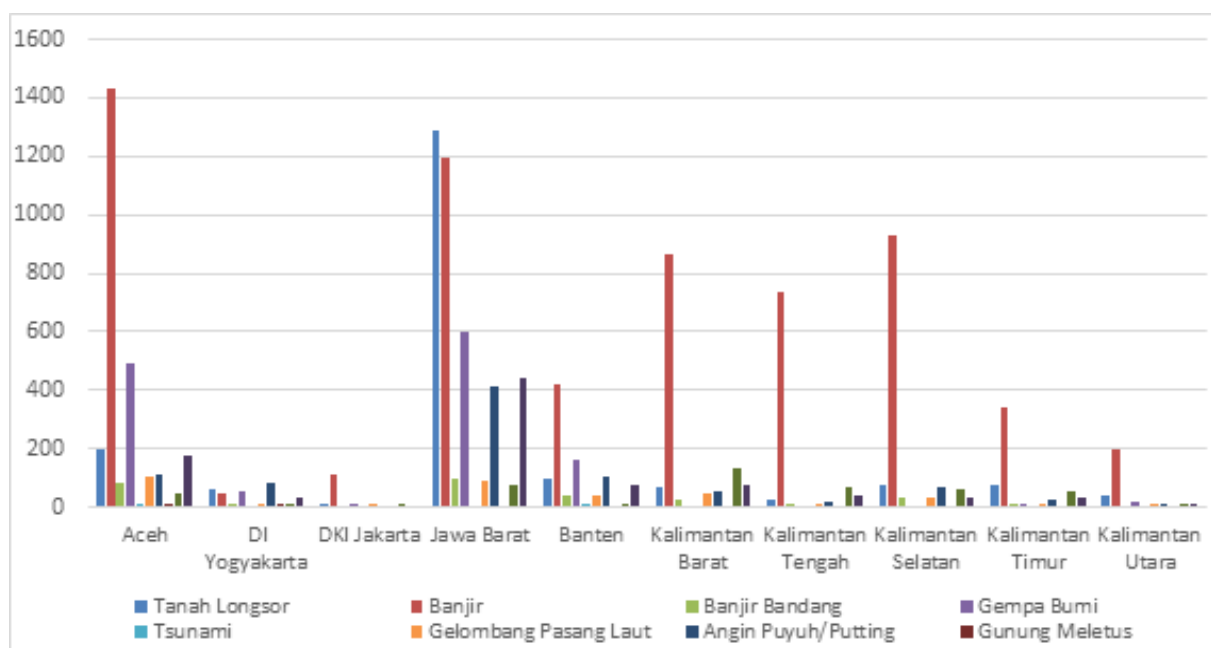
Provinsi	Total Bencana Alam				Tidak Ada Bencana Alam			
	2018		2021		2018		2021	
Aceh	6.030	9,34%	2.640	6,11%	2.630	6,07%	4.406	8,37%
DI Yogyakarta	566	0,88%	296	0,69%	115	0,27%	233	0,44%
DKI Jakarta	127	0,20%	123	0,28%	158	0,36%	152	0,29%
Kalimantan Barat	1.850	2,86%	1.263	2,92%	941	2,17%	1.158	8,37%
Kalimantan Tengah	1.750	2,71%	899	2,08%	490	1,13%	789	1,50%
Kalimantan Selatan	1.378	2,13%	1.229	2,84%	1.077	2,48%	973	1,85%
Kalimantan Timur	796	1,23%	547	1,27%	517	1,19%	628	1,19%
Kalimantan Utara	443	0,69%	285	0,66%	160	0,37%	248	0,47%
Indonesia	64.574		43.208		43.344		52.670	

Sumber: Mauleny, AT, (2022b)

sedikit potensi bencana alamnya. Sementara jika dibandingkan dengan seluruh provinsi di Kalimantan menunjukkan bahwa hampir seluruh provinsi di Kalimantan memiliki potensi bencana 6 sampai dengan 14 kali lebih besar daripada DKI Jakarta.

Gambar 2 memperlihatkan bagaimana perkembangan jenis bencana di beberapa provinsi pada tahun 2021. Terlihat bahwa DKI Jakarta tetap jauh lebih rendah potensi bencana yang dihadapi jika dibandingkan dengan seluruh provinsi yang ada di Kalimantan. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya desa/kelurahan yang terdampak bencana. Bencana yang dimaksud adalah tanah longsor, banjir, gempa bumi. Tsunami, gelombang pasang, angin puyuh dan gunung Meletus. Bahkan jika dilihat dari jenis

bencana alam yang mengancam, DKI Jakarta relatif rendah tingkat kedaruratannya, jika dibandingkan dengan seluruh provinsi yang ada di Kalimantan. Sepanjang tahun 2021 misalnya, DKI Jakarta hanya mengalami 109 banjir, 7 tanah longsor, 1 gempa bumi dan 1 kebakaran hutan. Berbeda dengan Kalimantan Timur yang mengalami 343 banjir, 74 tanah longsor, 5 banjir bandang, 6 gempa bumi, 9 gelombang pasang laut, 26 angin puyuh, 52 kebakaran dan 32 kekeringan. Melihat kondisi tersebut, bagaimana rencana pemerintah dalam menjadikan pemindahan IKN sebagai solusi mengatasi permasalahan DKI Jakarta, sementara potensi bencana Kalimantan Timur jauh lebih tinggi dibandingkan dengan DKI Jakarta. (Mauleny, AT, 2022b).



Sumber: Mauleny, AT, (2022b)

Gambar 2. Banyaknya Desa/Kelurahan di Beberapa Provinsi menurut Jenis Bencana Alam Tahun 2021

Terkait aspek geografis (khususnya banjir dan kemacetan) di Jakarta sebagai alasan utama dipindahkannya IKN ke Kalimantan Timur. Data menunjukkan bahwa sejak sebelum pandemi tingkat kemacetan di Jakarta sudah menurun 8 persen dan menduduki peringkat 10 dunia pada tahun 2019, turun 6 peringkat dibandingkan 2017 pada peringkat ke-4. Demikian pula dengan bencana banjir yang tercatat semakin berkurang. Luas wilayah tergenang pada tahun 2020 berkurang 125 km² menjadi hanya 156 km² dari semula 281 km² pada 2015, dan 455 km² pada 2007.

Hal ini tentu dapat mengindikasikan bahwa Jakarta masih mampu mengatasi permasalahan yang selama ini dikhawatirkan akan memperburuk kondisinya ketika dipertahankan untuk terus menjadi ibu kota negara. Tidak terlalu berlebihan rasanya jika dikatakan bahwa IKN masih bisa dipertahankan untuk berada di Jakarta. Adapun alasan lainnya misal terkait potensi perekonomian dapat digagas melalui pergeseran beberapa pusat perekonomian ke luar Jakarta.

Ditambah lagi dengan tersedianya anggaran infrastruktur Rp517 triliun yang akan dipergunakan untuk mewujudkan Jakarta bebas banjir, lalu lintas lancar dan urbanisasi terdistribusi merata pada 2030. Bappenas bersama pemerintah se-Jabodetabek merancang anggaran tersebut ditujukan untuk membenahi infrastruktur Jakarta dalam 10 tahun mendatang. Lima bidang pembangunan dalam proyek tersebut, yakni transportasi, air bersih, air limbah, perumahan, dan pengendalian banjir. Selain itu juga, Pemerintah provinsi DKI Jakarta juga telah menganggarkan Rp8,5 triliun untuk mengatasi kemacetan. Dimana separuh dari anggaran tersebut yakni sebesar Rp4,2 triliun diperuntukkan bagi subsidi *public service obligation* (PSO) Transjakarta. (megapolitan.kompas.com, 2022).

Aspek Geopolitik

Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur perlu memperhatikan fasilitas keamanan negara. Hal ini dikarenakan ibu kota baru yang akan dibangun di Kalimantan harus siap menghadapi ancaman dari internal maupun eksternal, apalagi letaknya semakin dekat dengan negara tetangga. Karena adanya ketidakjelasan batas negara dengan Malaysia, Filipina dan negara lain dipandang dapat membuat potensi konflik ke depannya (referensi). Pemindahan IKN ke Kalimantan secara wilayah mengakibatkan IKN yang baru akan lebih terbuka. Sehingga akan meningkatkan ancaman dari luar, apabila tidak diiringi dengan kesiapan dari aspek pertahanan dan keamanan.

Keberadaan ibu kota baru benar-benar

terlindungi jika sudah dilengkapi dengan infrastruktur pertahanan keamanan yang memadai. Sementara yang ada sekarang, belum memadai sama sekali. Dari segi geografis, geopolitik, posisi ibu kota baru itu berada di tengah dan terbuka yang mudah dijangkau oleh pasukan asing jika ingin melakukan serangan dari segala matra baik dari darat, laut, dan udara. Selain rawan terhadap ancaman invasi darat, lokasi ibu kota baru juga rawan dari invasi dan penetrasi pasukan dari wilayah laut

Pemerintah harus mengidentifikasi dan meredam benih-benih konflik SARA yang berpotensi muncul. Potensi konflik dapat muncul dari masuknya pendatang ke daerah calon ibu kota baru. Kedatangan orang-orang dengan berbagai latar belakang etnis dan agama tersebut dapat berpotensi menimbulkan konflik. Sebaliknya, migrasi kalangan dari pendatang ke IKN sejauh mungkin mampu menciptakan proses politik pembaruan di antara berbagai kalangan dalam rangka menciptakan sinergi di antara potensi yang dimiliki. Ini bisa kondusif dalam rangka menciptakan kekuatan mobilisasi pembangunan di IKN yang kondusif.

Sesuai dengan masukan Kemenhan pada waktu RDPU dengan Pansus Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara, pada 13 Januari 2022, melalui Dirjen Strahan Kemhan, bahwa sistem pertahanan yang dikembangkan dan dibutuhkan oleh IKN adalah bersifat lintas matra, baik darat, laut, maupun udara. Ini termasuk pula meliputi embangan zona terbatas dan terlarang melalui pengembangan sistem identifikasi pertahanannya. Di samping itu kesiapan sarana dan prasarana memadai bagi gelar pasukan yang bilamana dalam keadaan mendesak kebutuhannya, yang juga mampu memuat rencana kontijensi dan rute evakuasi VVIP nya.

Pemilihan lokasi yang akan dijadikan ibu kota negara baru, harus menyangkut pertimbangan geografis terhadap pertahanan dan keamanan wilayah. Meski lokasi calon IKN di antara Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan secara horizontal letak calon IKN baru berada di tengah wilayah NKRI yang berkepulauan, tetapi tidak berada di tengah secara sumbu vertikal. Namun letak Kalimantan Timur tersebut berdekatan dengan garis batas internasional. Menurut Andersen dalam buku *Geopolitics, Geography and Strategy*, garis batas internasional berpotensi menjadi tempat pertemuan militer antarnegara yang biasanya berkaitan dengan perebutan wilayah teritorial. Posisi IKN Baru juga berhimpit dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yaitu Selat Sunda-Laut Jawa-Selat Karimata-Laut Natuna dan Laut China Selatan. Meski relative aman untuk pelayaran, tetapi terdapat potensi

dimanfaatkan untuk kepentingan militer Angkatan perang negara lain (brin, 2022).

Aspek Ekonomi

Para ahli menekankan pentingnya kajian mendalam dalam proses tata kelola pembangunan IKN baru. Pengamat perkotaan juga menilai pembangunan infrastruktur yang dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi akan sangat merugikan. Ia berpesan agar perencanaan wilayah IKN baru harus mempertimbangkan kota-kota di sekitarnya agar kontra produktif terhadap perkembangan ibu kota dalam jangka panjang. Aksesibilitas yang mudah dan cepat dengan kota utama akan menyebabkan perkembangan kawasan IKN baru akan lebih lambat berkembang akibat keterbatasan fasilitas dan utilitas (kpbu.kemenkeu.go.id, 2022).

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur yang sudah direncanakan tahapannya oleh pemerintah jika dilihat dari aspek ekonomi perlu mempertimbangkan bagaimana kondisi perekonomian dan tantangan dinamika global pada saat regulasi pembangunan dan pemindahan IKN ditetapkan dan kemudian secara bertahap akan dikerjakan. Mengingat dibutuhkan pendanaan/pembiayaan yang cukup besar untuk menjamin dapat terlaksana semua tahapan pembangunan IKNnya. Namun besarnya pendanaan/pembiayaan yang dibutuhkan jika dilihat dari dampak positif pembangunan dan pemindahan IKN, menjadi tidak relevan untuk mengukur besarnya pengorbanan yang harus diberikan.

Kajian yang dilaksanakan oleh Bappenas menegaskan bahwa rencana pembangunan dan pemindahan IKN adalah upaya Pemerintah mempercepat transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi tersebut setidaknya membutuhkan tersedianya sumber daya manusia berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi strategis berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi digital, integrasi ekonomi domestik, dan terakhir pemindahan IKN, sebagaimana dipaparkan Deputy Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas (bappenas.go.id, 2022).

Pembangunan IKN menjadi miniatur penting dalam transformasi ekonomi. Menempatkan pembangunan dan pemindahan IKN sebagai *core* program sejalan dengan menjadikan IKN sebagai superhub ekonomi untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru. Jadi bukan hanya mengembangkan ekonomi Kalimantan Timur yang berbasis *value creation* tetapi juga mengimplementasikan strategi transformasi ekonomi Indonesia melalui superhub tersebut yang akan meningkatkan perdagangan antar wilayah di Indonesia.

Dengan potensi Indonesia sentris yang akan

terwujud, diperkirakan dampak pemindahan IKN tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional 0,1, sampai dengan 0,2 persen, sebagaimana disampaikan Deputy Pengembangan Regional Bappenas (bappenas.go.id, 2019). Dampak ekonomi lainnya seperti menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan karena kenaikan pendapatan sektor padat karya dan sektor padat modal, serta kesenjangan antar wilayah termasuk mendorong investasi di provinsi IKN dan sekitarnya.

Oleh karena itu, potensi peningkatan aspek ekonomi dari pembangunan dan pemindahan IKN melalui transformasi ekonomi dan Indonesia sentris yang melahirkan disertifikasi ekonomi dan *multiplier effect*, harus didukung semua pihak agar dapat berjalan efektif. Sejalan dengan optimis dan waspada yang menjadi visi Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan negara di tahun 2023, maka strategi pengalokasian pendanaan/pembiayaan IKN yang diperkirakan mencapai Rp466 triliun, harus tetap mempertimbangkan resiliensi dan *vulnerability* keuangan negara mengingat ruang fiskal yang terbatas (Mauleny, AT, 2022b).

Mauleny, AT (2022b) kembali menekankan optimis dan waspada sebagaimana didengungkan Menteri Keuangan, harus terus dijalankan dengan tetap mengedepankan upaya mewujudkan tahapan pembangunan dan pemindahan IKN, yang membutuhkan strategi pendanaan/pembiayaan yang *extraordinary* di tengah tantangan dinamika global yang terjadi dan keharusan kembali kepada defisit di bawah 3 persen yang harus dipenuhi. Lampiran 2 Rencana Induk dari UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara menjelaskan skema pendanaan/pembiayaan IKN didapatkan dari kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU), dan investasi baik dari swasta maupun BUMN, termasuk pengelolaan aset di ibu kota baru maupun di Jakarta. Namun porsi pembiayaan yang paling banyak direncanakan dari KPBU dan investasi langsung, diperkirakan mencapai Rp340,6 triliun.

Peraturan Pemerintah sebagai regulasi turunan menyebutkan bahwa KPBU IKN lebih diutamakan dalam pembiayaan untuk penyediaan infrastruktur yang diprakarsai oleh Menteri, Kepala Lembaga, direksi BUMN dan/atau Kepala Otorita (PP Pendanaan IKN, 2022). Untuk mendukung pembiayaan melalui skema KPBU diberikan alternatif kompensasi dan jaminan dari pemerintah seperti tambahan nilai sebesar 10 persen, pemberian hak untuk penawar terbaik (*right to match*), serta skema pengembalian investasi dalam bentuk tarif atau *availability payment*. Jadi dukungan pemerintah terhadap KPBU IKN diberikan melalui Menteri dengan memperhatikan kapasitas fiskal nasional,

dapat berupa fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi KPBU IKN, dukungan kelayakan, insentif perpajakan, dan penjaminan pemerintah.

Sementara untuk skema pembiayaan yang diperoleh dari pengelolaan aset dalam hal ini Barang Milik Negara (BMN) termasuk yang diperoleh dari peralihan Barang Milik Daerah (BMD) dan Aset Dalam Penguasaan (ADP), baik yang berlokasi di Jakarta maupun di IKN, dilakukan melalui skema sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, kerja sama penyediaan infrastruktur, dan kerja sama terbatas untuk penyediaan infrastruktur. Jangka waktu sewa maksimal diberikan paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Menteri. Sementara jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani. Sementara pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan, Otorita IKN dapat melakukan pemungutan pajak khusus IKN dan/atau pungutan khusus IKN (Mauleny, AT, 2022b).

Dengan demikian lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, meski telah menjadi kesepakatan bersama DPR dan Pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia sentris yang maju dan berkelanjutan dengan potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1 persen. Namun pemenuhan pendanaan/pembiayaan harus mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dengan memperluas potensi kontribusi dari kerjasama pemerintah dan badan usaha termasuk swasta. Sementara untuk pendanaan penyelenggaraan pemerintahan yang diperoleh dari pengelolaan aset, BMN dan ADP, maupun pemungutan pajak khusus IKN atau bentuk dukungan pemerintah lainnya, harus memperhatikan legalitas dan jangka waktunya sehingga tidak merugikan bagi aspek keberlanjutannya. (Mauleny, AT, 2022b).

Belum lagi ketika dihadapkan pada bentuk kelembagaan IKN dan proses pengelolaan keputusan didalamnya. Arsil, F, (2022) berpandangan bahwa pengelolaan IKN memiliki kecenderungan *executive heavy* yang berpotensi mengurangi *checks and balances* dari Lembaga legislatif. Dalam hal ini, saran untuk menambah klausula yang menegaskan adanya evaluasi, peran signifikan DPR dan DPRD serta pengawasan dalam regulasi UU IKN menjadi hal yang perlu untuk ditekankan demi menjamin partisipasi dan *checks and balances* di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara baru.

KESIMPULAN

Merencanakan dan mengelola pemangku kepentingan dalam pemindahan ibukota khususnya

keluar dari pulau Jawa harus dipahami sebagai suatu proses yang sangat penting sebelum menentukan keputusan besar untuk memindahkan ibukota keluar Jakarta atau tetap menempatkan Jakarta sebagai ibukota negara. Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa pemindahan ibukota tidak semata didorong oleh pertimbangan kondisi ibu kota lama yang sudah terlalu padat dan kurang tersedianya infrastruktur dan fasilitas perkotaan di tempat baru. Pertimbangan politik dan sosio-ekonomi-ekologi juga harus menjadi faktor penting dalam keputusan pemindahan ibu kota negara.

Indonesia perlu dengan sangat seksama membahas detail rencana berikut pelibatan semua pemangku kepentingan termasuk sosialisasi pemindahan ibukota negara ini secara efektif dan tepat sasaran. Studi yang mendalam dan melibatkan berbagai pihak di pusat maupun di daerah dan dukungan berupa legitimasi formal sangat diperlukan untuk menentukan pilihan terbaik dari semua skenario pemindahan ibukota negara. Setelah pilihan tersebut ditetapkan akan diperlukan pula suatu perencanaan yang komprehensif agar implementasi pilihan tersebut berjalan dengan akurat serta adaptif terhadap kondisi *force majeure* seperti bencana maupun pandemi. Keputusan pemindahan ibukota negara akan menjadi proyek publik terbesar dan terpenting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Penting untuk dipahami semua pihak, apa dan bagaimana faktor penghambat dan pendorong dalam kebijakan pembangunan dan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur.

Sebagai proyek publik besar dan penting, pembangunan dan pemindahan IKN memiliki potensi aspek ekonomi yang strategis melalui transformasi ekonomi dan Indonesia sentris yang melahirkan diversifikasi ekonomi dan *multiplier effect*. Namun demikian, potensi ekonomi yang besar harus tetap mempertimbangkan aspek sosiologis, aspek geografis, dan aspek geopolitik. Oleh karena itu harus didukung semua pihak agar dapat berjalan efektif. Sejalan dengan prinsip optimis dan waspada yang menjadi visi pengelolaan keuangan negara tahun 2023, maka strategi pengalokasian pendanaan/pembiayaan IKN yang direncanakan jangka pendek agar terwujud pada tahun 2024, harus tetap mempertimbangkan resiliensi dan *vulnerability* keuangan negara mengingat ruang fiskal yang masih terbatas dengan kewajiban pemerintah memenuhi ketentuan kembali ke defisit di bawah 3 persen pada tahun 2023 yang juga harus dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arsil, F. (2022). Problematika Regulasi UU Ibu Kota Negara: Gagasan Memperkuat Checks and Balances dan Partisipasi Publik dalam "Ibu Kota Nusantara: Strategi Menuju Indonesia Baru?" PT Publica Indonesia Utama.
- Bappenas. 2019. "Kajian Konsolidasi: Penentuan Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara." Dokumen tidak diterbitkan.
- Doxiadis, C.A. (1968). *Ekistics: An introduction to the Science of Human Settlements*. London: Oxford University Press.
- Dye, T.R. (1976). *Policy Analysis: What Governments Do, Why They Do it, and What Difference it Makes*. Tuscaloosa, AL: University of Alabama Press.
- Illmann, Erik. Reasons for Relocating Capital Cities and Their Implications. Prague, 2015. 69 pages. Bachelor Thesis (Bc.) Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Political Studies. Department of Political Science. Supervisor of the Thesis PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
- Mauleny, AT. (2022a). Urgensi Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur dalam "Ibu Kota Nusantara: Strategi Menuju Indonesia Baru?" PT Publica Indonesia Utama.
- Mauleny, AT. (2022b). Skema Pembiayaan/Pendanaan IKN Nusantara dalam "Ibu Kota Nusantara: Strategi Menuju Indonesia Baru?" PT Publica Indonesia Utama.
- Weimer, D. L & Vining, A. R (2011). *Policy analysis: Concepts and Practice*. Boston : Longman.

Jurnal

- Deborah, P. (1985). Capital Relocation in Africaidee of Lilongwe in Malawi. *The Geographical Journal*, Vol. 151 (2), 182-196.
- Gilbert, A. (1989). Moving the capital of Argentina: A further example of utopian planning? *Cities*, 6, 234-242.
- Hoyle, B.S. (1979), African Socialism And Urban Development: The Relocation Of The Tanzanian Capital. *Tijdschrift voor economische en sociale geografie*, 70, 207-216.
- Kearns, K. (1973): Belmopan: Perspective on a New Capital. *Geographical Review*, 63:2, 147-169.

- Ishenda, D.K. & Guoqing, S. (2019), Determinants in Relocation of Capital Cities. *Journal of Public Administration and Governance*, 'ol. 9(4), 200-220.
- Nwafor J.C. (1980). The relocation of Nigeria's Federal Capital: A device for greaterideial integration and national unity. *GeoJournal*, vol. 4 (4), 359-366.
- Stephenson G. V. (1970). *Two Newly Created Capitals: Islamabad and Brasilia*. *Town Planning Review*, Vol. 41 (4).

Sumber Digital

- Amos, J (2020, April 23), Kalimantan Timur: Ilmuwan temukan risiko tsunami dekat calon ibu kota baru Indonesia. Diperoleh tanggal 10 September 2022.
- BPS, (2020). Badan Pusat Statistik. Data diakses 29 November 2022.
- CNN Indonesia (2019, Agustus 30), BNPB: Ada Potensi Banjir dan Tsunami di Ibu Kota Baru. Diperoleh tanggal 10 September 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190830184213-20-426226/bnpb-ada-potensi-banjir-dan-tsunami-di-ibu-kota-baru>.
- ide. & Frigo G. (2020, April 14), Lessons from Brasilia: on the empty modernity of Indonesia's new capital. <https://www.newmandala.org/lessons-from-brasilias-on-the-empty-modernity-of-indonesias-new-capital/>.
- Dian Mayasari, Ibu Kota Negara Baru: Integrasi Infrastruktur dan Kelestarian Alam, (2022). <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1150-1404/umum/kajian-opini-publik/ibu-kota-negara-baru-integrasi-infrastruktur-dan-kelestarian-alam>.
- Oktaviant, Herlina. (2022). Gelaran Pembahasan Kelompok Kerja Infrastruktur (Infrastruktur Working Group) Forum G20 Resmi Dimulai. <http://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1135-1308/umum/kajian-opini-publik/gelaran-pembahasan-kelompok-kerja-infrastruktur-infrastruktur-working-group-forum-g20-resmi-dimulai>, diakses 1 November 2022.
- Rendy A. Diningrat. 2019. "Menggugat Logika Pemerintah Memindahkan Ibu Kota Negara." *theconversation.com* 28 Agustus 2019, diakses 29 November 2022.

Satria A.I (2021, Agustus 30), The Absence of Regulations and Civil Servants Buy-in Policy in Indonesia's Move to a New Capital. <https://stratsea.com/the-absence-of-regulations-and-civil-servants-buy-in-policy-in-indonesias-move-to-a-new-capital/>.

Tim Peneliti INDEF, Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru (2019, Agustus 23) <https://indef.or.id/update/detail/tantangan-persoalan-ekonomi-sosial-dan-pemerintahan-ibu-kota-baru>.

Vernando, Zaki. 2022. "Skema KPBU, Apa Perannya dalam Mendukung Pembangunan IKN?" <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1142-1364/umum/orang-juga-bertanya/skema-kpbu-apa-perannya-dalam-mendukung-pembangunan-ikn>, diakses pada 29 November 2022.

Sumber Lain

UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 41. Sekretariat Negara. Jakarta.

Lampiran 2 dari UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mengenai Rencana Induk.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, pembangunan, dan Pindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Rukmana, D. (2021, Mei 11), Pindahan Ibukota Negara. <https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-391-749-20200706213210.pdf>.

Dirjen Strahan Kemhan, "Konsep Pertahanan Ibu Kota Negara", Jakarta, 13 Januari 2022.

Laporan Pengumpulan Data "Aspek politik dan pertahanan keamanan.

Rencana Pindahan Ibukota negara", FISIP, Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, 7 November 2019.

"Pindahan IKN Upaya Pemerintah Lakukan Transformasi Ekonomi", Berita Pembangunan, (<https://www.bappenas.go.id/id/berita/pindahan-ikn-upaya-pemerintah-lakukan-transformasi-ekonomi-PLGmo>). 7 Juli 2022.

"Bappenas Paparkan Hasil Kajian Pindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. (<https://dpmpd.kaltimprov.go.id/artikel/bappenas-paparkan-hasil-kajian-pindahan-ibu-kota-negara-ke>

kalimantan). 21 Agustus 2019.

"Fraksi PKS Tolak Tetapkan RUU IKN Jadi UU", <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37044/t/Fraksi+PKS+Tolak+Tetapkan+RUU+IKN+jadi+UU>, diakses 7 November 2022.

"Akademisi Kritik Rencana Jokowi Pindahkan Ibu Kota." <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190826105438-8-94547/akademisi-kritik-rencana-jokowi-pindahkan-ibu-kota>, data diakses 29 November 2022.

"Ekonom Pertanyakan Urgensi Pemerintah Pindahkan Ibu Kota Saat Pandemi." <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211209193409-532-732173/ekonom-pertanyakan-urgensi-pemerintah-pindahkan-ibu-kota-saat-pandemi>, diakses 7 November 2022.

"Emil Salim Khawatirkan Pindahan Ibu Kota Hilangkan Nilai Historis Negara." <https://nasional.kontan.co.id/news/emil-salim-khawatirkan-pindahan-ibu-kota-hilangkan-nilai-historis-negara>, diakses 7 November 2022.

"Bangun 12 Kawasan Ekonomi Khusus, RI Tarik Investasi Rp 221 T" <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3135095/bangun-12-kawasan-ekonomi-khusus-ri-tarik-investasi-rp-221-t>, diakses 29 November 2022.

"Konflik Massal Kalimantan Timur Lebih Tinggi Dibandingkan Wilayah Kalimantan Lainnya" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/27/konflik-massal-kalimantan-timur-lebih-tinggi-dibandingkan-wilayah-kalimantan-lainnya>, diakses 29 November 2022.

"(Revisi) Perbandingan PDRB per kapita di Pulau Jawa, Ini Provinsi Terendah pada 2021", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/28/revisi-perbandingan-pdrb-per-kapita-di-pulau-jawa-ini-provinsi-terendah-pada-2021>, diakses 29 November 2022.

"BPS Catat Pulau Jawa Sumbang PDB Terbesar", <https://www.infoindonesia.id/read/2022/02/07/12501/bps-catat-pulau-jawa-sumbang-pdb-terbesar>, diakses 29 November 2022.

"Ibu Kota Negara Pindah ke Wilayah Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara", <https://www.kominfo.go.id/content/detail/20899/ibu-kota-negara-pindah-ke-wilayah-penajam-pasir-utara-dan-kutai-kartanegara/0/berita>, diakses 29

November 2022.

“BMKG Ungkap Adanya 3 Sesar Sumber Gempa di Kalimantan Timur”, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/24/155553865/bmkg-ungkap-adanya-3-sesar-sumber-gempa-di-kalimantan-timur?page=all>, diakses 29 November 2022.

“Pemprov DKI alokasikan Rp8,5 triliun untuk atasi macet, separuhnya untuk subsidi transjakarta”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/08/20575771/pemprov-dki-anggarkan-rp-85-triliun-untuk-atasi-macet-separuhnya-untuk>, diakses 29 November 2022.

“Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Tinjauan Geografi Pertahanan”, <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/pemindahan-ibu-kota-negara-dalam-tinjauan-geografi-pertahanan/>, diakses 29 November 2022.